

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur (Soepono, 1993: 43). Pencapaian sasaran yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan direalisasikan melalui penyusunan perencanaan pembangunan. Salah satu perhatian dalam penyusunan perencanaan tersebut dapat dilakukan dengan menggali, mengelola, dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang selanjutnya hasilnya ditujukan untuk kepentingan pembangunan nasional. Ini berarti diperlukan suatu model perencanaan yang dapat mengidentifikasi potensi ekonomi di suatu daerah atau dengan melakukan identifikasi atas keunggulan maupun kelemahan dari sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu daerah (Tarigan, 2004: 75).

Model otonomi daerah yang diberlakukan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka setiap pemerintahan kabupaten/kota sebagai daerah otonom didorong untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Adiatmojo, 2003: 1-2). Untuk mewujudkan suatu bentuk pemerintahan daerah yang efektif terutama dalam pengelolaan sumber daya di daerahnya masing-masing, diperlukan suatu kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di mana secara proporsional kewenangan tersebut direalisasikan melalui pengaturan,

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Setiap perencanaan atas pembiayaan atau pendanaan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan aspek pada kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang tanpa mengurangi arti perwujudan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Isu utama dalam otonomi daerah di Indonesia terletak pada kesiapan daerah baik di Tingkat I maupun di Tingkat II terutama yang tergolong dalam kelompok Indonesia bagian timur seperti Propinsi Kalimantan Barat (Kaho, 1997: 4-6). Kesiapan tersebut meliputi kemampuan dalam melakukan reorganisasi dan kemampuan dalam mendukung keuangan daerah secara mandiri. Supriyanto (1993: 47) mencrangkan bahwa model sentralisasi yang sebelumnya diterapkan tidak memberikan kewenangan bagi pemerintahan daerah untuk secara mandiri melakukan bentuk perencanaan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang ada di daerahnya masing-masing. Model sentralisasi seperti ini yang selanjutnya menyebabkan adanya bentuk ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi terutama di daerah Tingkat I di wilayah Indonesia bagian timur.

Kesiapan dalam menjalankan bentuk otonomi daerah berdasarkan kemandirian keuangan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola maupun mengoptimalkan sumber-sumber perekonomiannya (Adiatmojo, 2003: 2-3). Pada Tabel 1.1, Propinsi Kalimantan Barat tergolong propinsi yang memiliki pertumbuhan PDRB per kapita yang terendah atau di bawah pertumbuhan PDB per kapita dibandingkan dengan propinsi lain di Pulau Kalimantan di mana pertumbuhannya pada tahun 2002 ditunjukkan sebesar 2,01 persen atau masih di bawah pertumbuhan PDB per kapita sebesar 3,66 persen. Besarnya PDRB

per kapita untuk Propinsi Kalimantan Barat pada tahun 2002 ditunjukkan sebesar Rp 5.156,6 milyar. Dibandingkan dengan tiga propinsi lainnya di Pulau Kalimantan, besarnya PDRB Propinsi Kalimantan Barat adalah yang terendah.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dan Kontribusi PDRB
Daerah Tingkat I di Indonesia,
Tahun 2002

No	Propinsi	PDRB	
		Per Kapita [*])	% Δ
1	Kalimantan Barat	5.156,6	2,01
2	Kalimantan Tengah	7.021,4	3,27
3	Kalimantan Selatan	6.690,2	3,07
4	Kalimantan Timur	34.285,3	4,29
INDONESIA (PDB)		7.594,3[*])	3,66

Sumber: BPS (2004): Beberapa Indikator Penting Mengenai Indonesia

Keterangan:

- % Δ = pertumbuhan PDRB dalam satuan persen
- Dinyatakan dalam satuan milyar Rupiah.

Pada perkembangan tiga tahun terakhir sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001, terdapat tiga sektor perekonomian di Propinsi Kalimantan Barat yang mendominasi kegiatan perekonomian daerah. Ketiga sektor tersebut adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Ketiga sektor perekonomian tersebut memiliki kontribusi sektoral terhadap PDRB di atas 20 persen dari tahun 2001 hingga 2003. Dominasi ketiga sektor perekonomian di daerah tersebut menunjukkan besarnya pengalokasian sumberdaya-sumberdaya di daerah yang lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor tersebut. Besarnya pengalokasian sumberdaya-sumberdaya yang terkonsentrasi pada beberapa sektor ekonomi menunjukkan pengertian adanya sektor unggulan di Propinsi Kalimantan Barat. Terbentuknya sektor unggulan di daerah terutama di Propinsi Kalimantan Barat tidak

terlepas dari adanya program pemberdayaan perekonomian daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 1994.

Tabel 1.2
Pangsa Sektor/Lapangan Usaha Dalam Produk Domestik Regional Bruto di
Propinsi Kalimantan Barat, 2001 – 2003
(Dalam persen)

Lapangan Usaha (Sektor)	2001		2002		2003	
	Pangsa	% Δ	Pangsa	% Δ	Pangsa	% Δ
1. Pertanian	26,06	-1,04	25,93	1,81	25,90	1,37
2. Pertambangan dan Penggalian	1,38	-3,61	1,37	1,25	1,42	5,49
3. Industri Pengolahan	22,52	-6,69	23,27	5,69	22,80	-0,53
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,83	2,16	0,94	16,35	1,00	7,78
5. Bangunan	6,10	3,91	5,91	-0,88	6,32	8,63
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	21,33	-1,74	21,00	0,68	20,81	0,61
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7,06	-1,72	6,97	1,10	7,00	1,92
8. Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan	5,57	0,04	5,48	0,63	5,55	2,84
9. Jasa-jasa/Services	9,15	1,00	9,12	2,014	9,20	2,37
PDRB (Riil)	100	-2,06	100	2,29	100	1,52

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS), 2001-2003

Keterangan:

% Δ : pertumbuhan

Berdasarkan pertumbuhan per tahun, sektor industri pengolahan di Propinsi Kalimantan Barat menunjukkan kecenderungan yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2001, pertumbuhan pangsa sektoralnya terhadap PDRB mengalami peningkatan dari sebesar 22,52 persen menjadi 22,8 persen pada tahun 2003. Dibandingkan dua sektor unggulan lainnya, yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, hanya sektor industri pengolahan yang pertumbuhan pangsa sektoralnya mengalami peningkatan. Sektor-sektor bukan unggulan ditunjukkan memiliki rata-rata pertumbuhan sektoral per tahun lebih tinggi daripada pertumbuhan dari masing-masing sektor unggulan dari tahun 2001 hingga 2003.

Sektor pertanian di Propinsi Kalimantan Barat merupakan sektor ekonomi yang mendominasi kegiatan perekonomian di daerah. Pada perkembangannya tiga tahun terakhir dari tahun 2001 hingga 2003, sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar bagi output daerah atau PDRB. Sektor-sektor unggulan lainnya, yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran masih memberikan peran atau kontribusi terbesar bagi output daerah. Dibandingkan dengan sektor pertanian, pangsa sektoral dari kedua sektor unggulan tersebut masih di bawah rata-rata pangsa sektoral sebesar 25 persen dari tahun 2001 hingga 2003.

Pada perkembangan tiga tahun terakhir dari tahun 2001 hingga 2003, sektor-sektor ekonomi di Propinsi Kalimantan Barat yang tergolong bukan sektor unggulan ditunjukkan memiliki pangsa kurang dari 10 persen. Sektor jasa-jasa adalah sektor bukan unggulan yang memiliki pangsa tertinggi terhadap PDRB di antara sektor-sektor ekonomi bukan unggulan. Sektor pertambangan dan penggalian dan sektor listrik, gas, dan air minum adalah dua sektor ekonomi di Propinsi Kalimantan Barat yang persentase kontribusi terhadap PDRB tergolong paling rendah, yaitu di bawah 5 persen.

Kesenjangan antara sektor-sektor unggulan dan sektor-sektor bukan unggulan di Propinsi Kalimantan Barat yang cukup besar ini dikarenakan terfokusnya alokasi sumberdaya-sumberdaya di daerah pada sektor-sektor ekonomi tertentu. Sektor pertanian misalnya, tersebar di seluruh daerah Tingkat II terutama untuk jenis tanaman pangan. Sebagian besar keberadaan dari sektor-sektor unggulan tidak terlepas adanya keterkaitan dengan sektor-sektor unggulan maupun sektor-sektor bukan unggulan serta faktor lokasional yang ada di daerah. Keberadaan sektor-sektor

bukan unggulan juga tidak terlepas dari perkembangan sektor-sektor unggulan di mana sektor-sektor bukan unggulan dapat berintegrasi dengan sektor-sektor lainnya baik sektor-sektor unggulan maupun sektor-sektor bukan unggulan.

Pertimbangan dalam pengembangan sektor ekonomi menjadi sektor basis harus didasarkan pada kemampuan sektor ekonomi untuk dapat bersinambungan secara terus menerus di masa yang akan datang. Sektor basis juga harus memiliki kemampuan untuk dapat mengintegrasikan sebagian besar atau keseluruhan sektor-sektor ekonomi yang ada di daerah tanpa mengurangi kontribusi dari masing-masing sektor tersebut terhadap PDRB. Sektor unggulan yang dipertimbangkan dapat menjadi basis perekonomian didasarkan pada pertimbangan besarnya pangsa atau kontribusinya terhadap PDRB dan pertumbuhannya serta keberlanjutannya di masa yang akan datang.

Model pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dapat mengandung makna adanya bentuk pergeseran sektoral terutama di daerah-daerah Tingkat I di Indonesia seperti Propinsi Kalimantan Barat. Salah satu bentuk pergeseran sektoral tersebut ditunjukkan melalui pengalokasian sumberdaya-sumberdaya ke lapangan usaha lain non-pertanian. Hal ini dapat terjadi jika kemampuan penyerapan sumberdaya-sumberdaya di satu sektor tidak dapat mengimbangi adanya keberagaman sumberdaya-sumberdaya baru. Ini berarti untuk mendukung model perekonomian yang berkelanjutan, sangat dibutuhkan sektor-sektor ekonomi yang dapat mengalokasikan dengan segera atas keberagaman sumberdaya-sumberdaya untuk selanjutnya diproses dengan sedemikian rupa menjadi output.

Tabel 1.3
Rata-Rata Pangsa Sektoral Terhadap PDRB dan Rata-Rata Pertumbuhan
Sektor-Sektor Ekonomi Per Tahun di Propinsi Kalimantan Barat,
1994-2003

No.	Sektor / Lapangan Usaha	Rata-Rata Kontribusi Per Tahun	Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun
1	Pertanian	25,39	10,23
2	Pertambangan dan Penggalian	1,41	13,78
3	Industri Pengolahan	22,00	11,18
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	0,84	14,67
5	Bangunan	5,99	10,63
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	21,12	9,54
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7,82	5,01
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	6,03	5,04
9	Jasa-Jasa	9,40	8,62
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)			9,25

Sumber: Lampiran I.B (telah diolah)

Selama periode dari tahun 1994 hingga 2003, sektor pertanian ditunjukkan masih mendominasi kegiatan perekonomian di daerah di mana rata-rata kontribusi per tahun terhadap PDRB sebesar 25,39 persen. Bentuk pergeseran sektoral dapat terlihat dari adanya dua sektor unggulan lain, yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Rata-rata pertumbuhan sektoral untuk sektor industri pengolahan ditunjukkan lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan sektoral untuk sektor pertanian. Dalam hal ini, model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Propinsi Kalimantan Barat masih berfokus pada ketiga sektor ekonomi tersebut berdasarkan rata-rata pangsa sektoral per tahun. Sedangkan angka pertumbuhan sektoral tidak dapat menjamin sektor tersebut dapat menjadi basis ekonomi di daerah pada masa yang akan datang.

Dalam model otonomi daerah, masing-masing daerah didorong untuk dapat membiayai kegiatan perekonomian di daerahnya masing-masing (Adiatmojo, 2003: 1-3). Inilah yang selanjutnya dikatakan sebagai bentuk kemandirian daerah di mana

masing-masing daerah otonom dapat mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap pemerintah pusat. Untuk dapat merealisasikan bentuk kemandirian daerah tersebut, tiap daerah harus memiliki sektor ekonomi yang merupakan basis ekonomi di daerah. Perencanaan pembangunan yang strategik sangat diperlukan untuk merealisasikan mana di antara sektor-sektor ekonomi di daerah yang dapat dikembangkan menjadi basis ekonomi daerah di masa yang akan datang.

Salah satu upaya untuk merencanakan pembangunan ekonomi tersebut adalah dengan melakukan identifikasi terhadap sektor-sektor ekonomi yang dapat dijadikan sebagai basis ekonomi daerah di masa yang akan datang (Susilo, 1999: 2-3). Proses identifikasi sektoral tersebut dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria dari sektor basis, yaitu kemampuan untuk bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, memiliki sumberdaya-sumberdaya yang dapat dengan mudah diperbaharui kembali, dan mampu bersinergi dengan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk proses identifikasi ini adalah metode analisis *location quotient* atau LQ dan analisis *shift-share*. Kedua metode analisis tersebut memberikan informasi yang cukup memadai mengenai kriteria-kriteria dari sektor basis berupa peran sektoral terhadap perekonomian daerah, percepatan pertumbuhan rata-rata, dan kemampuan bersaing dengan sektor-sektor serupa dari daerah lain. Identifikasi juga meliputi aspek ketersediaan sumberdaya-sumberdaya yang selanjutnya menjadi faktor keunggulan lokasional sehingga sektor ekonomi yang dimaksud dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pergeseran sektoral yang menjadi fokus pembahasan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengamatan

pergeseran sektoral di Propinsi Kalimantan Barat. Pengamatan difokuskan pada permasalahan di daerah terutama dalam mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi yang selanjutnya dapat dikembangkan sebagai basis perekonomian di daerah. Propinsi Kalimantan Barat yang memiliki PDRB per kapita terendah di antara propinsi-propinsi lain di Pulau Kalimantan memerlukan tindakan untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam terutama di sektor pertanian, industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Untuk keperluan tersebut, akan digunakan dua pendekatan analisis sektoral, yaitu metode *location quotient* atau analisis LQ dan metode analisis *shift-share*. Penggunaan dua metode ini ditujukan untuk melihat bagaimana perbandingan hasil pengukuran sektoral untuk kasus di Kalimantan Barat. Adapun tahun pengamatan ditetapkan dari tahun 1994 hingga tahun 2003.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada sub bagian latar belakang, maka rumusan masalah dapat dituliskan sebagai berikut:

- 1) Sektor ekonomi manakah yang memiliki potensi dalam struktur perekonomian di Propinsi Kalimantan Barat dari tahun 1994 hingga 2003?
- 2) Bagaimanakah pergeseran atau perubahan struktur perekonomian yang terjadi dalam sektor-sektor ekonomi di Propinsi Kalimantan Barat dari tahun 1994 hingga 2003?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis sektor ekonomi yang memiliki potensi dalam struktur perekonomian di Propinsi Kalimantan Barat dari tahun 1994 hingga 2003.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pergeseran atau perubahan struktur perekonomian yang terjadi dalam sektor-sektor ekonomi di Propinsi Kalimantan Barat dari tahun 1994 hingga 2003.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan referensi dalam penulisan penelitian yang akan datang untuk menambah daftar pustaka bagi Fakultas ekonomi pada umumnya dan program Studi Ekonomi Pembangunan pada khususnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dalam identifikasi potensi relatif ekonomi di daerah terutama dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Kalimantan Barat diharapkan dapat memperoleh gambaran secara obyektif mengenai potensi ekonomi dan merumuskan atau merancang program pengembangan yang dapat mendorong pengembangan perekonomian secara efektif.

1.5. Studi Terkait

Pengamatan mengenai analisis potensi relatif ekonomi di suatu daerah/wilayah menjadi perhatian dari beberapa kalangan peneliti seperti Susilo (1999), Seda (2000), dan Adiatmojo (2003). Pengamatan tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran potensi ekonomi di suatu daerah yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai referensi dalam perancangan kebijakan pembangunan terutama yang ada di daerah. Aspek lain yang mendorong dilakukannya pengamatan tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan model otonomi daerah sejak tahun 1999 di mana masing-masing daerah dituntut untuk dapat mengelola kegiatan perekonomiannya dengan mengoptimalkan kemampuan atau potensi sumber daya yang dimilikinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilo (1999) melakukan pengamatan atas adanya bentuk pergeseran dan prospek sektoral di Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Jogjakarta. Pengamatan yang mengambil periode dari tahun 1981 hingga 1996 tersebut ditujukan untuk mengetahui potensi masing sektor ekonomi (lapangan usaha) yang ada pada PDRB dengan menggunakan alat analisis berupa analisis *mix-share* dan *location quotient*. Tujuan penggunaan kedua alat analisis tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana keunggulan komparatif dari masing-masing sektor atau lapangan usaha. Hasil pengamatan ditemukan bahwa sektor ekonomi di Kabupaten Sleman, D.I. Jogjakarta yang dapat dikembangkan adalah sektor sewa rumah, sektor jasa, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, dan sektor perdagangan. Berdasarkan kemampuan ekonomi regional atas gambaran mengenai keunggulan komparatif, pemerintah daerah diharapkan secara bertahap dan konsisten dapat mengembangkan sektor sewa rumah, industri pengolahan, jasa, bangunan, dan

perdagangan. Penggunaan kedua alat analisis berupa *mix-share* dan *location quotient* dapat merepresentasikan secara seimbang mengenai gambaran keunggulan komparatif di Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Jogjakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Seda (2000) mengamati bentuk pergeseran sektoral sektor-sektor ekonomi di Propinsi Jawa Timur rentang pengamatan dari tahun 1993 hingga 1998. Pengamatan tersebut ditujukan untuk melihat bagaimana terjadinya pergeseran sektoral terutama dalam rangka untuk melihat bentuk potensi sektor-sektor ekonomi yang ada di Propinsi Jawa Timur. Hasil pengamatan ditujukan untuk keperluan perencanaan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dapat dijadikan sebagai basis perekonomian daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis *location quotient* (LQ) dan pendekatan analisis *shift-share*. Kedua metode ini memiliki kesimpulan yang dapat memperkuat permasalahan terhadap adanya bentuk pergeseran sektoral dari sektor-sektor ekonomi pada awal periode pengamatan hingga periode akhir pengamatan.

Hasil penelitian menemukan bahwa sektor pertanian menunjukkan peran yang mulai berkurang atau menurun terhadap kegiatan perekonomian daerah. Hal ini ditunjukkan melalui hasil analisis untuk komponen bauran industri (*proportional-shift*) yang negatif. Sektor yang sedang mengalami peningkatan pertumbuhan di Propinsi Jawa Timur adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air minum, dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Adiatmojo (2003) memanfaatkan tema pembangunan berkelanjutan untuk mengamati bentuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam di Kabupaten Musi

Banyuasin pada tahun 1993 hingga 2000. Penelitian tersebut dilakukan oleh adanya fakta bahwa perekonomian di Kabupaten Banyuasin sangat tergantung dari pemanfaatan atau eksploitasi sumberdaya alam berupa minyak dan gas bumi. Ketergantungan yang cukup tinggi ini dapat menjadi kendala bagi program pengembangan perekonomian daerah ketika cadangan minyak dan gas bumi dinyatakan habis. Identifikasi atas potensi relatif dari masing-masing sektor perekonomian sangat diperlukan untuk dijadikan referensi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya yang bukan berasal dari minyak dan gas (migas). Alat analisa yang digunakan adalah *location quotient* dan *shift-share* terhadap masing-masing sumberdaya yang dijadikan sebagai obyek pengamatan selain migas. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran rencana penerapan pembangunan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Hasil pengamatan melaporkan bahwa kegiatan-kegiatan yang berada dalam sektor pertanian ditunjukkan memiliki rata-rata nilai LQ lebih besar daripada 1 dengan nilai *shift-share* rata-rata sebesar 21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam sektor pertanian dapat dijadikan atau memiliki prospek sebagai basis perekonomian daerah.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah untuk pengamatan dari tahun 1994 hingga 2003. Adapun penentuan periode pengamatan sebanyak 10 tahun tersebut didasarkan pada

pertimbangan kelengkapan hasil pengamatan yang mempergunakan data pada periode terakhir tahun 2003 dan periode tahun 1994 sebagai masa dimulainya tahap pembangunan berkelanjutan di masing-masing daerah. Data tahunan tersebut meliputi keseluruhan sektor atau lapangan usaha yang terdapat dalam informasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan harga berlaku yang selanjutnya dijadikan data riil dengan menggunakan tahun 2003 sebagai tahun dasar.

1.6.2. Metode Analisis

1.6.2.1. Analisis *Location Quotient*

Analisis *location quotient* (kuosien lokasi) atau disingkat LQ adalah suatu perbandingan mengenai besarnya peranan suatu sektor atau lapangan usaha di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor atau lapangan usaha tersebut secara nasional (Tarigan, 2004: 78-79). Metode ini dapat pula dipergunakan untuk mengukur seberapa besar suatu sektor dalam suatu perekonomian di daerah/wilayah dapat menjadi basis kegiatan ekonomi di daerah itu sendiri. Konsep analisis ini dianggap cukup sederhana dan mudah diterapkan karena hanya memanfaatkan informasi dari data PDRB untuk diperoleh nilai prosentase distribusi dari masing-masing sektor atau lapangan usaha.

Tehnik dalam metode *location quotient* diperhitungkan sebagai perbandingan antara distribusi berupa prosentase dari sektor-sektor perekonomian di suatu daerah dan distribusi berupa prosentase dari sektor-sektor perekonomian secara nasional

(Tarigan, 2004: 78-79). Rumus untuk menghitung nilai LQ diterangkan sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{\frac{x_i}{PDRB}}{\frac{X_i}{PDB}}$$

di mana:

LQ_i = nilai LQ untuk sektor i di Propinsi Kalimantan Barat

x_i = nilai PDRB sektor i di Propinsi Kalimantan Barat

PDRB = total nilai PDRB di Propinsi Kalimantan Barat

X_i = total nilai PDB untuk sektor i

PDB = total nilai PDB.

Rumus LQ di atas dipergunakan untuk menghitung hasil perbandingan antara distribusi masing-masing sektor di daerah dan distribusi masing-masing sektor secara nasional (Adiatmojo, 2003: 15-16). Untuk menerangkan nilai LQ diperlukan kriteria atau klasifikasi yang dapat menyatakan arti dari nilai yang ditunjukkan sebagai informasi atas gambaran potensi ekonomi di suatu daerah. Adapun kriteria atau klasifikasi untuk menerangkan nilai LQ adalah sebagai berikut (Tarigan, 2004: 78-79):

1) $LQ > 1$,

Menunjukkan peranan sektor tersebut di daerah lebih besar daripada peranan sektor itu secara nasional. Hal ini menunjukkan adanya surplus sumberdaya yang terdapat pada sektor tersebut atau memiliki kemampuan dalam mengeksport surplus ke daerah lain atau ke luar negeri karena adanya kemampuan dalam menghasilkan produk tersebut secara lebih murah dan lebih efisien. Namun, ini tidak menjadi suatu petunjuk secara langsung

bahwa daerah tersebut dikatakan memiliki keunggulan komparatif untuk sektor i yang dimaksud.

2) $LQ < 1$,

Menunjukkan bahwa peranan sektor i di daerah lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara nasional. Dalam hal ini, sektor i yang dimaksud tidak mampu memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan diri karena ketidakunggulan dalam aspek sumberdaya sehingga menyebabkan biaya untuk penyelenggaraan produksi menjadi lebih mahal. Jika diperoleh nilai LQ kurang dari satu, maka terdapat sedikit kesempatan bagi sektor i yang dimaksud dapat dijadikan basis perekonomian di daerah tersebut.

Metode analisis LQ dapat digunakan atau sangat relevan untuk mengamati keunggulan komparatif bagi sektor-sektor atau lapangan usaha yang telah lama berkembang di suatu daerah (Tarigan, 2004: 78). Jika terdapat kegiatan-kegiatan dalam sektor perekonomian yang baru berkembang, maka metode analisis LQ tidak dapat atau kurang relevan digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut. Keunggulan metode analisis LQ adalah kesederhanaannya terutama untuk bentuk analisis satu sasaran (*one shot analysis*) seperti untuk mengetahui apakah LQ berada di atas 1 atau tidak.

Metode lain yang diterapkan dalam penelitian adalah metode yang dikembangkan dari konsep pengukuran LQ , yaitu *Dynamic Location Quotient* (DLQ) (Yuwono, 1999: 4-6). Prinsip DLQ masih sama seperti LQ , akan tetapi lebih memfokuskan introduksi laju pertumbuhan yang digunakan sebagai asumsi bahwa setiap nilai tambah pada aspek sektoral maupun PDRB memiliki rata-rata laju

pertumbuhan per tahun yang terpisah selama kurun waktu antara tahun (0) dan tahun

(t). Pembentukan rumus DLQ dituliskan sebagai berikut:

$$LQ = \left\{ \frac{X_{ino} (1 + g_{in})^t / Y_{ino} (1 + g_n)^t}{X_{io} (1 + G_i)^t / Y_o (1 + G)^t} \right\}$$

di mana:

X_{ino} : nilai tambah sektor i di daerah (n) pada tahun (0)

X_{io} : nilai tambah sektor i secara nasional pada tahun (0)

g_{in} : rata-rata laju pertumbuhan sektor i di daerah (n)

G_i : rata-rata laju pertumbuhan sektor i secara nasional

Y_{no} : PDRB di daerah (n) pada tahun (0)

Y_o : PDB pada tahun (0)

g_n : rata-rata pertumbuhan PDRB di daerah (n)

G : rata-rata pertumbuhan PDB

Rumus di atas dituliskan ulang dari rumus LQ. Jika diasumsikan bawa $X_{ino}/Y_{no} = X_{io}/Y_o$, maka akan terbentuk rumus DLQ yang dituliskan sebagai berikut:

$$DLQ = \left\{ \frac{(1 + g_{in}) / (1 + g_n)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right\}^t$$

Kondisi untuk DLQ dapat dikategorikan menjadi tiga kemungkinan, yaitu:

1) $DLQ = 1$

Proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju pertumbuhan PDRB di daerah (n) sebanding dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut dengan laju pertumbuhan PDRB daerah himpunan, yaitu daerah nasional.

2) $DLQ < 1$

Proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju pertumbuhan daerah (n) lebih rendah dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut

terhadap PDRB daerah himpunannya. Dalam hal ini, selama keadaan masih seperti yang terlihat saat ini, maka di masa yang akan datang, sektor (i) di daerah (n) akan kalah bersaing dengan sektor (i) di daerah lain dalam wilayah daerah himpunan. Demikian sebaliknya.

1.6.2.2. Analisis *Shift-Share*

Metode analisis *shift-share* merupakan metode untuk mengetahui potensi relatif dari suatu sektor atau lapangan usaha dengan melakukan perbandingan antara perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor atau lapangan usaha di daerah yang diamati dengan wilayah nasional (Tarigan, 2004: 79). Dalam metode ini, akan dijelaskan penyebab terjadinya perubahan atas beberapa variabel yang diamati dengan menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah tetap dalam kaitannya dengan ekonomi nasional.

Beberapa pengamatan menyatakan metode ini sebagai *industrial mix analysis* karena komposisi industri yang ada sangat mempengaruhi laju pertumbuhan wilayah tersebut. Artinya, dalam pengamatan ini akan diketahui apakah industri yang berlokasi di wilayah tersebut termasuk ke dalam kelompok industri yang secara nasional memang berkembang pesat di mana industri tersebut cocok berlokasi di wilayah itu atau tidak. Analisis *shift-share* dapat mengguhikan variabel output atau nilai tambah (*value added*) di mana data yang dipergunakan adalah data dalam bentuk

nilai konstan maupun nilai riil berdasarkan tahun dasar tertentu. Pertambahan output regional total (ΔE) dapat diuraikan menjadi komponen *shift* dan komponen *share*. Komponen *share* sering pula disebut komponen *national share* (N) yang menyatakan banyaknya pertambahan output regional seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju pertumbuhan nasional selama periode pengamatan. Hal ini terutama dapat dimanfaatkan untuk melihat kriteria bagi daerah yang diamati untuk mengukur apakah daerah itu tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari rata-rata pertumbuhan nasional.

Komponen *shift* adalah bentuk penyimpangan (*deviation*) dari *national share* dalam pertumbuhan output regional. Penyimpangan ini positif di daerah-daerah yang tumbuh lebih cepat dan bernilai negatif untuk daerah-daerah yang tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan output secara nasional (Tarigan, 2004: 79-80). Bagi setiap daerah, *shift netto* dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu *proportional shift component* (P) dan *differential shift component* (D). *Proportional shift component* (P) atau dikenal sebagai komponen struktural atau *industrial mix*, mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini dapat bernilai positif untuk daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh lebih cepat dan bernilai negatif untuk daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau mengalami penurunan.

Differential shift component (D) atau disebut juga sebagai komponen lokasional atau regional menyatakan sisa kelebihan yang mengukur besarnya *shift*

regional netto yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang diamati daripada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional internal (Tarigan, 2004: 80-81). Suatu daerah yang memiliki keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah atau efisien, akan memiliki nilai *differential shift component* yang positif. Sedangkan untuk daerah yang secara lokasional dikatakan tidak menguntungkan apabila memiliki *differential shift component* yang negatif.

Kedua komponen *shift* ini memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan yang bersifat internal. *Proportional shift* adalah akibat dari pengaruh unsur-unsur luar yang bekerja secara nasional. Sedangkan, *differential shift* adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja khusus di daerah yang diamati. Dengan menggunakan notasi aljabar seperti yang dijelaskan di bawah ini, pembentukan hubungan di antara komponen dapat dikemukakan melalui persamaan berikut ini (Tarigan, 2004: 80-81):

$$\Delta E_r = E_{r,t} - E_{r,t-n} \dots\dots\dots (1.1)$$

di mana:

E = menyatakan banyaknya output

Δ = notasi pertambahan, yaitu tahun akhir (t) dikurangi dengan angka tahun sebelumnya (t-n)

r = menyatakan wilayah (*region*)

t = tahun pengamatan

t-n = tahun awal.

Persamaan (1.1) diartikan sebagai pertambahan output wilayah/regional, yaitu banyaknya output pada tahun akhir (t) dikurangi dengan jumlah output pada tahun

awal (t-n). Persamaan tersebut dapat berlaku untuk total output di wilayah tersebut di mana secara per sektor dituliskan sebagai berikut:

$$\Delta E_{r,i} = E_{r,i,t} - E_{r,i,t-n} \dots\dots\dots (1.2)$$

di mana:

E = menyatakan banyaknya output

Δ = notasi pertambahan, yaitu tahun akhir (t) dikurangi dengan angka tahun sebelumnya (t-n)

r = menyatakan wilayah (*region*)

t = tahun pengamatan

t-n = tahun awal

i = sektor industri.

Persamaan (1.2) diartikan sebagai pertambahan output regional untuk sektor i, yaitu jumlah output sektor i pada tahun akhir (t) dikurangi dengan output sektor i pada tahun awal (t-n).

Pertambahan output regional untuk sektor i dapat dijabarkan atas pengaruh dari *national share* (Ns), *proportional share* (P), dan *differential shift* (D). Persamaan dalam notasi aljabar dituliskan sebagai berikut:

$$\Delta E_{r,i,t} = (Ns_i + P_{r,i} + D_{r,i}) \dots\dots\dots (1.3)$$

di mana:

t = menyatakan tahun

Ns = *national share*

P = *proportional share*

D = *differential shift*.

Pada persamaan (1.3), peranan *national share* (Ns) dianggap memiliki pertambahan output regional sektor i yang sama dengan proporsi pertambahan output nasional secara rata-rata. Hal ini dapat pula dituliskan sebagai berikut:

$$Ns_{i,t} = E_{r,i,t-n} \cdot \left(\frac{E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) - E_{r,i,t-n} \dots\dots\dots (1.4)$$

di mana:

Ns = *national share*

E = banyaknya output

N = menyatakan wilayah nasional (*national*) atau wilayah yang strukturnya lebih tinggi dari wilayah pengamatan

r = menyatakan wilayah yang diamati

i = menyatakan sektor / lapangan usaha (industri)

t = menyatakan tahun pengamatan

t-n = menyatakan tahun awal (sebelumnya).

Komponen *national share* (Ns) yang dituliskan pada persamaan (1.4) dapat diuraikan sebagai berikut:

$E_{r,i,t-n}$ = Besarnya nilai sektor i di Propinsi Kalimantan Barat pada periode (tahun) sebelumnya

$E_{N,i,t}$ = Besarnya nilai sektor i secara nasional atau yang tercatat pada Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode t

$E_{N,i,t-n}$ = Besarnya nilai sektor i secara nasional atau yang tercatat pada Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode sebelumnya.

Proportional shift (P) dihitung dengan melihat pengaruh sektor i secara nasional terhadap pertumbuhan output sektor i pada region atau daerah yang diamati. Hal ini dapat pula dituliskan sebagai berikut:

$$P_{r,i,t} = \left\{ \left(\frac{E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) - \left(\frac{E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right) \right\} \times E_{r,i,t-n} \dots\dots\dots (1.5)$$

di mana:

P = *proportional share*

E = banyaknya output

N = menyatakan wilayah nasional (*national*) atau wilayah yang strukturnya lebih tinggi dari wilayah pengamatan

r = menyatakan wilayah yang diamati

i = menyatakan sektor / lapangan usaha (industri)

t = menyatakan tahun pengamatan

$t-n$ = menyatakan tahun awal (sebelumnya).

Hasil yang sama juga dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$P_{r,i,t} = \left(\frac{\Delta E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} - \frac{\Delta E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right) \times E_{r,i,t-n} \dots\dots\dots (1.6)$$

di mana:

$\Delta E_{N,i,t}$ = Besarnya nilai pertumbuhan sektor i secara nasional pada periode t

$\Delta E_{N,t}$ = Besarnya nilai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode t

$E_{N,i,t-n}$ = Besarnya nilai sektor i secara nasional atau yang tercatat pada Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode sebelumnya

$E_{N,t-n}$ = Besarnya nilai PDB (output nasional) pada periode sebelumnya

$E_{r,i,t-n}$ = Besarnya nilai sektor i di Propinsi Kalimantan Barat pada periode (tahun) sebelumnya.

Differential shift (D) menggambarkan adanya penyimpangan antara pertumbuhan sektor i di wilayah/daerah yang diamati terhadap pertumbuhan sektor i secara nasional (Tarigan, 2004: 82-83). Rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$D_{r,i,t} = \left\{ E_{r,i,t} - \left(\frac{E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) \times E_{r,i,t-n} \right\} \dots\dots\dots (1.7)$$

di mana:

D = *differential shift*

E = banyaknya output

N = menyatakan wilayah nasional (*national*) atau wilayah yang strukturnya lebih tinggi dari wilayah pengamatan

r = menyatakan wilayah yang diamati

i = menyatakan sektor / lapangan usaha (industri)

t = menyatakan tahun pengamatan

t-n = menyatakan tahun awal (sebelumnya).

Hasil yang sama juga dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$D_{r,i,t} = \left(\frac{\Delta E_{r,i,t}}{E_{r,i,t-n}} - \frac{\Delta E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) \times E_{r,i,t-n} \dots\dots\dots (1.8)$$

di mana:

$\Delta E_{r,i,t}$ = Besarnya nilai pertumbuhan (perubahan) sektor i di Propinsi Kalimantan Barat pada periode t

$\Delta E_{N,i,t}$ = Besarnya nilai pertumbuhan sektor i secara nasional pada periode t

$E_{r,i,t-n}$ = Besarnya nilai sektor i di Propinsi Kalimantan Barat pada periode sebelumnya

$E_{N,i,t-n}$ = Besarnya nilai sektor i secara nasional atau yang tercatat pada Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode sebelumnya.

Perlu diketahui bahwa apabila hendak melihat pengaruh dari masing-masing sektor atau lapangan usaha terhadap seluruh wilayah yang dianalisis, maka angka untuk masing-masing sektor harus ditambahkan di mana rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\Delta E_r = (Ns + P_r + D_r) \dots\dots\dots (1.9)$$

di mana:

$$Ns_t = \sum_{t=1}^n \left(E_{r,i,t-n} \times \left(\frac{E_{N,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) - E_{r,i,t-n} \right)$$

$$P_{r,t} = \sum_{t=1}^n \left[\left\{ \left(\frac{E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) - \left(\frac{E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right) \right\} \times E_{r,i,t-n} \right]$$

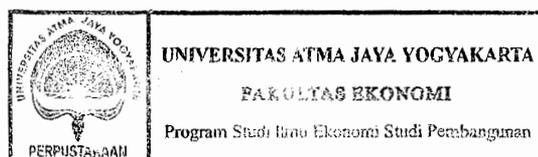
$$D_{r,t} = \sum_{t=1}^n \left[\left\{ E_{r,i,t} - \left(\frac{E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) - E_{r,i,t-n} \right\} \right]$$

Persamaan (1.9) dijelaskan bahwa besarnya nilai *shift-share* ditunjukkan sebagai total nilai komponen *national share*, *proportional-shift*, dan *differential-shift* dari masing-masing sektor.

1.7. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan definisi operasional dari sektor-sektor ekonomi yang diperoleh dari literatur dan studi sebelumnya. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, maka perlu menentukan defnisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan seperti di bawah ini.

1) Produk Domestik Bruto (PDB)



yaitu besarnya output (barang dan jasa) akhir yang dihasilkan di Indonesia selama kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam nilai riil. Adapun metode untuk mentransformasikan nilai nominal dari PDB ke dalam nilai riil didasarkan pada rumus yang dituliskan sebagai berikut (Sakirno, 1994: 56):

$$NR_i = \left(\frac{100}{IHK_i} \right) \times NB_i$$

di mana:

NR_i = Nilai riil pada tahun i

NB_i = Nilai berlaku nominal pada tahun i

IHK_i = Indeks Harga Konsumen pada tahun i.

Tahun dasar yang dipergunakan adalah tahun 2003 atau 2003=100.

2) **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil**

yaitu besarnya output (barang dan jasa) akhir yang dihasilkan di daerah (Propinsi Kalimantan Barat) selama kurun waktu satu tahun yang dinyatakan ke dalam nilai riil. Adapun rumus pembentukan nilai adalah sama dengan rumus sebelumnya, akan tetapi indeks harga konsumen yang digunakan (IHK) adalah indeks harga di daerah. Demikian pula nilai riil untuk sektor-sektor ekonomi di Propinsi Kalimantan Barat.

3) **Sektor Pertanian**

Besarnya keseluruhan output akhir bidang kegiatan/usaha pertanian yang dihasilkan di Propinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu satu tahun yang dinyatakan ke dalam nilai riil.

4) **Sektor Pertambangan dan Penggalian**

Besarnya keseluruhan output akhir bidang kegiatan/usaha pertambangan dan penggalian yang dihasilkan di Propinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu satu tahun yang dinyatakan ke dalam nilai riil.



5) Sektor Industri Pengolahan

Besarnya keseluruhan output akhir bidang kegiatan/usaha industri pengolahan yang dihasilkan di Propinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu satu tahun yang dinyatakan ke dalam nilai riil.

6) Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum

Besarnya keseluruhan output akhir bidang kegiatan/usaha listrik, gas, dan air minum yang dihasilkan di Propinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu satu tahun yang dinyatakan ke dalam nilai riil.

7) Sektor Bangunan

Besarnya keseluruhan output akhir bidang kegiatan/usaha bangunan yang dihasilkan di Propinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu satu tahun yang dinyatakan ke dalam nilai riil.

8) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Besarnya keseluruhan output akhir bidang kegiatan/usaha perdagangan, hotel, dan restoran yang dihasilkan di Propinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu satu tahun yang dinyatakan ke dalam nilai riil.

9) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Besarnya keseluruhan output akhir bidang kegiatan/usaha pengangkutan dan komunikasi yang dihasilkan di Propinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu satu tahun yang dinyatakan ke dalam nilai riil.

10) **Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan**

Besarnya keseluruhan output akhir bidang kegiatan/usaha keuangan, persewaan, dan komunikasi yang dihasilkan di Propinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu satu tahun yang dinyatakan ke dalam nilai riil.

11) **Sektor Jasa-Jasa**

Besarnya keseluruhan output akhir bidang kegiatan/usaha jasa-jasa yang dihasilkan di Propinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu satu tahun yang dinyatakan ke dalam nilai riil.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisaan skripsi ini disusun secara sistematis seperti yang diuraikan berikkut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini akan dijelaskan teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bagian ini menguraikan mengenai gambaran umum di Propinsi Kalimantan Barat seperti kondisi geografis, penduduk, dan kondisi ekonomi.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang hasil analisis yang dilakukan dan disertai pembahasan terhadap hasil yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari data yang dianalisis dan saran-saran untuk masa yang akan datang.